

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Suatu alasan pokok yang mendorong penulis untuk mengambil topik organisasi internasional dibidang ekonomi adalah bahwasanya studi internasional tidak selalu berorientasi pada hubungan antar negara berupa peperangan sebagai akibat dari watak perebutan kekuasaan sebagaimana yang dikemukakan Hans J. Morgenthau bahwa "politik internasional, seperti halnya semua politik merupakan perebutan kekuasaan ...".¹

Masalah yang menyangkut pada bidang *low politics* pada umumnya dan ekonomi pada khususnya telah menjadi perhatian dan masalah internasional. Ditambah lagi apabila kondisi krisis ekonomi pada suatu negara tertentu akan dapat merusak sistem perekonomian regional dan juga sistem perekonomian dunia. Tentu saja dampak buruk dari kondisi ekonomi yang parah tersebut menyebabkan pengaruh yang sangat besar bagi tatanan kehidupan negara yang bersangkutan.

Untuk itu dibentuklah suatu lembaga internasional untuk mempromosikan kesehatan perekonomian baik pada suatu negara maupun dalam tatanan perekonomian dunia. Namun tentu saja kondisi yang berbeda dari tiap-tiap negara menimbulkan bermacam-macam hambatan untuk mencapai tujuan dasar.

B. Latar Belakang Masalah

Dengan semakin meningkatnya intensitas hubungan internasional, maka semakin meningkat pula jumlah organisasi internasional baik yang universal maupun regional. Semua organisasi internasional itu pada umumnya memiliki maksud yang sama yaitu untuk kerja sama antar anggotanya.

Peranan organisasi internasional dewasa ini juga meningkat dengan pesat, dimana organisasi international dianggap sebagai forum terbaik untuk mengkoordinasikan tindakan-tindakan yang akan dilakukan yang menyangkut berbagai isu.

Dana Moneter Internasional adalah salah satu badan khusus dalam sistem Perserikatan Bangsa-bangsa yang didirikan berdasarkan perjanjian internasional pada tahun 1945 untuk membantu mempromosikan kesehatan perekonomian dunia.²

Dengan markas besarnya berlokasi di Washington, D.C., IMF adalah lembaga sentral dari sistem moneter internasional yaitu sistem pembayaran dan nilai tukar internasional di antara mata-mata uang nasional yang memungkinkan dilaksanakannya kegiatan bisnis di antara negara-negara di dunia.³

Negara anggota IMF pada awalnya hanya beranggotakan 39 negara. Eropa Timur menjadi anggota tetapi pada tahun 1950-an keluar karena adanya perang dingin. Jepang dan Jerman bergabung pada tahun 1953, dimana sebelumnya pada

² www.imf.org/tujuandasar.0803/html

³ Ibid.

tanggal 24 Juli 1950, Indonesia sudah menjadi anggota. Hingga sampai tahun 2003 negara anggota mencapai 184 negara.

IMF bertujuan untuk mencegah krisis dalam sistem tersebut dengan mendorong negara-negara supaya melaksanakan kebijakan ekonomi yang baik. Seperti diindikasikan dalam namanya, IMF juga merupakan suatu dana yang dapat dimanfaatkan oleh anggota yang memerlukan pembiayaan sementara untuk menyelesaikan masalah neraca pembayaran.⁴

Keberhasilan IMF dapat dilihat di negara Meksiko. Penyelesaian utang luar negeri swasta ala Meksiko, yang disebut Fidorca, pada intinya merupakan pelembagaan langkah-langkah *rescheduling* penyelesaian utang. Utang berjangka pendek diubah menjadi jangka panjang dengan *grace period* tertentu guna memberi kesempatan bagi debitur menempuh cara mengumpulkan devisa.

Dengan Fidorca, sektor swasta Meksiko bisa menjadwalkan kembali pelunasan utang-utangnya. Perekonomian bisa berputar dan pertumbuhan ekonomi positif. Pada tahun 1997, perekonomian Meksiko tumbuh 5,1 persen dari 5,09 % pada tahun 1996, dan cadangan devisanya US\$ 21,7 miliar, ekspor

⁴ IMF memiliki cadangan devisa sebesar US\$ 24

Beberapa kunci sukses Focorca :

1. Pihak debitur Meksiko tidak meninggalkan kewajibannya. Problem yang mereka hadapi adalah kesulitan likuiditas jangka pendek. Namun dalam jangka panjang, mereka tetap punya kemampuan membayar (*solvency*)
2. Kedua, ada sebuah badan yang dibentuk pemerintah untuk memasok devisa (terutama dalam bentuk US\$), debitur swasta memang harus bekerja keras. Badan ini menjual devisa dengan kurs peso/US\$ tertentu dan dialokasikan untuk mencicil utang luar negeri.
3. Pihak kreditur mau memberi toleransi dengan grace period tertentu. Utang jangka pendek yang semula macet (*non-performing loans*) bisa diubah statusnya menjadi utang jangka panjang.
4. Pihak Amerika Serikat *full concern* untuk menangani kasus krisis Meksiko (*Tequilla Effect*)
5. Keberhasilan Pemerintah Meksiko menjaga konsistensi reformasi di semua bidang, termasuk politik khususnya untuk memberantas korupsi. ⁵

Bantuan luar negeri yang diberikan IMF ditujukan kepada negara-negara anggotanya tidak hanya ditujukan pada mereka yang terkena *balance of payment crisis*, yaitu adanya ketidakseimbangan jangka panjang dalam neraca pembayarannya. Ketidakseimbangan ini mencerminkan kelemahan ekonomi suatu bangsa dan diperlukan tindakan pemerintah untuk memperbaiki defisit keuangannya.

Untuk menerima paket bantuan IMF, suatu negara diwajibkan untuk terlebih dahulu menandatangani *Letter of Intent* (LoI) yang pada dasarnya merangkum kesediaan negara penerima bantuan untuk melakukan perubahan-perubahan paket kebijakan ekonomi sesuai yang disarankan oleh IMF.

Persyaratan yang lebih dikenal dengan istilah *conditionality* (kondisionalitas) yang ditetapkan oleh IMF terhadap penerima bantuan terdiri dari beberapa kebijakan yang meliputi :⁶

6. Pembenahan struktur ekonomi makro, yaitu menciptakan stabilitas struktur ekonomi makro melalui upaya perbaikan di sektor industri dalam negeri.
7. Liberalisasi dan optimalisasi mekanisme pasar, yakni upaya untuk memperbaiki kinerja mekanisme pasar dalam rangka untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi yang meliputi berbagai strategi kebijakan .
8. Pembenahan kebijakan moneter, yaitu menetapkan kebijakan moneter terutama yang menyangkut penetapan nilai tukar mata uang secara rasional.
9. Pembenahan sektor fiskal dan finansial, yakni upaya untuk mengurangi defisit anggaran belanja negara dan upaya untuk memobilisasi dana dari dalam dan luar negeri untuk menghidupkan kembali iklim investasi yang telah porak poranda oleh krisis,

Dalam memberikan bantuan kepada negara peminjam, IMF tidak hanya

waktu tertentu. Dana bantuan dari IMF, sesuai dengan artikel pertama dari *Artickel of Agreement*, IMF bertujuan untuk :⁷

1. Meningkatkan kerjasama internasional melalui sebuah insttusi yang permanen yang akan menyediakan fasilitas untuk konsultasi dalam masalah-masalah moneter internasional.
2. Menyediakan fasilitas bagi perluasan dan pertumbuhan perdagangan internasional untuk menyokong peningkatan dan pemeliharaan pasar tenaga kerja dan *real income*, dan bagi pembangunan sumber-sumber yang produktif dari semua anggota sebagai tujuan terpenting dari kebijakan ekonomi.
3. Untuk meningkatkan stabilitas nilai tukar, memelihara persetujuan peraturan pertukaran diantara anggotadan untuk menghindari depresi nilaitukar yang kompetitif
4. Untuk menolong pendirian sistem pembayaran multilateral antara negara anggota dan menghilangkan hambatan-hambatan dalam pertukaran luar negeri yang merintanggi pertumbuhan perdagangan internasional
5. Untuk memperpendek waktu dan memperkecil tingkat ketidakseimbangan *balance of payments* dari negara-negara anggota.

Dalam memberikan bantuan kepada suatu negara, IMF juga melakukan intervensi terhadap negara yang dibantunya. Intervensi ini tertuang dalam IMF *Supported Program* yang salah satunya adalah *structural adjustment policies*

lain adalah berbeda-beda tergantung pada situasi dan kondisi negara yang bersangkutan.

IMF melakukan pemantauan perkembangan dan kebijakan ekonomi dan keuangan dari negara-negara anggotanya dan pada tingkat global, dan memberikan nasehat dan masukan kebijakan kepada anggotanya berdasarkan pengalamannya yang lebih dari lima puluh tahun. Misalnya; dalam tinjauan tahunannya tentang ekonomi Jepang untuk tahun 2000, Dewan Eksekutif IMF menghimbau secara serius pemerintah Jepang untuk melakukan upaya stimulasi pertumbuhan ekonomi dengan mempertahankan kebijakan suku bunga pada tingkat rendah, mendorong restrukturisasi korporat dan perbankan, dan mempromosikan deregulasi dan persaingan. IMF juga memberi pujian kepada pemerintah Meksiko karena manajemen ekonominya yang bijaksana pada tahun 2000. IMF mendukung langkah-langkah yang mengarah pada penerapan secara berangsur kebijakan pentargetan inflasi dan mengungkapkan kekhawatirannya tentang tidak memadainya tingkat kapitalisasi sistem perbankan.

Sedangkan untuk kawasan Asia, selama krisis keuangan Asia tahun 1997-1998, IMF bertindak cepat untuk menolong Korea dengan memperkuat cadangan devisanya. IMF menyediakan \$21 miliar untuk membantu Korea mereformasi perekonomiannya, merestrukturisasi sektor-sektor korporat dan keuangannya, dan memulihkan perekonomiannya dari resesi. Dalam waktu empat tahun, Korea telah cukup pulih kembali untuk melunasi pinjaman tersebut dan sekaligus juga membangun kembali cadangan devisanya.⁸

⁸ Indra Ismawan, Op.Cit. hal 13.

Pada pertengahan 1997, perkembangan dunia ekonomi diwarnai oleh krisis Asia yang berawal dari krisis nilai tukar *Bath* Thailand. Krisis tersebut akhirnya merebak ke beberapa negara anggota ASEAN dan Korea Selatan, Malaysia dan Philipina termasuk negara yang mengalami krisis tersebut namun tidak separah yang terjadi di Indonesia, Thailand dan Korea Selatan. Akibat dari krisis tersebut, pertumbuhan ekonomi Asia menurun dari 8,3% pada tahun 1996 menjadi 6,8% pada tahun 1997 dan terus turun hingga 4% pada tahun 1998 yang disebabkan karena negara-negara yang mengalami krisis terparah akan mengalami kontradiksi pertumbuhan ekonomi.⁹

Pada pertengahan 1997, IMF terlibat dalam menangani krisis moneter yang melanda Asia, dimana arus modal swasta di Indonesia, Malaysia dan Philipina mengalami penurunan dari US\$ 93 miliar menjadi US\$ 12 miliar.

Pada mulanya kebutuhan yang paling penting adalah memperkuat dan menstabilkan mata uang internasional, dan IMF memberikan nasehat kepada Indonesia untuk mengimplementasikan aturan yang keras termasuk menutup 16 Bank bermasalah yang dilakukan pada bulan November 1997 dan menyatukan beberapa bank swasta pada bulan-bulan berikutnya.

Untuk menjaga kredibilitas perbankan serta untuk menundukkan pasar dan para investor, pemerintah merekomendasikan adanya pergantian komisaris atau direktur suatu bank, meminta para pemegang saham untuk menambah modal mereka, meningkatkan kualitas asset yang mereka miliki dan mencari investor

baru. Akan tetapi program pemerintah ini tidak mendapat dukungan dari pihak-pihak bank itu sendiri.

Ketidakmampuan mempertahankan konsistensi pelaksanaan program atau kebijakan merupakan masalah yang mungkin paling rumit karena menyangkut berbagai aspek yang sensitif. Masalah ini nampaknya jelas bagi semua meskipun semua bertanya-tanya mengenai apa alasan sesungguhnya. Bahwa setelah berjalan lama kebijakan meminta bantuan IMF sering masih menjadi perdebatan merupakan salah satu contoh.

Salah satu model badan yang dibentuk oleh Dana Moneter Internasional (IMF) untuk Indonesia yang lebih akrab dengan sebutan *Indonesian Bank Restructuring Agency* (IBRA) yang tugas utamanya menyetatkan industri perbankan. Atau dalam konteks Indonesia dinamakan Badan Penyetatan Perbankan Nasional. BPPN dikatakan unik karena memang tidak sama dan sebangun dengan lembaga penyetatan yang ada di negara-negara lain. Seperti *Financial Restructuring Agency* (FRA) di Thailand yang khusus menangani restrukturisasi keuangan atau identik dengan *Bank Restructuring Unit* (BRU)-nya BPPN, *Korean Asset Management Corporation* (KAMCO) di Korea lebih mirip dengan Aset Manajemen Investasi (AMI)-nya BPPN, atau Danaharta Malaysia yang lebih mirip dengan Aset Manajemen Kredit (AMC)-nya BPPN, atau sebut saja *Federal Deposit Insurance Corporation* (FDIC) di AS yang lebih mirip dengan lembaga penjamin deposito.

Pendek kata, peran dan cakupan tugas BPPN demikian luas dan tidak spesifik. Itu sebabnya banyak pihak menjuluki BPPN sebagai *super body* atau lembaga mini berkekuatan maksi. Itu sebabnya pula BPPN perlu dibekali dengan PP No. 17/1999 tentang hak dan wewenang BPPN yang amat luas. Mulai dari membatalkan perjanjian, membatalkan putusan hukum sampai hak otoritas menjual aset yang ada ditangannya dengan perlindungan hukum.

BPPN, atau setidaknya pemerintah, mengklaim tingkat *recovery rate* yang dihasilkan selama bekerja enam tahun sebesar 28 persen, suatu angka yang debatable. Karena dibalik angka itu tidak memasukkan unsur biaya yang sudah dikeluarkan demikian besar dan dibebankan kepada rakyat Indonesia. *Center for Banking Crisis* (CBC) -lembaga pengawas perbankan-- melalui kajian dan penelitiannya menghitung tingkat *recovery rate* BPPN berkisar 1 persen hingga 2,9 persen saja. Atau katakanlah angka 28 persen dapat dianggap sebagai angka final, itu pun masih terlalu kecil bila dibandingkan lembaga penyehatan yang dimiliki negara lain.

Kenyataan bahwa BPPN telah mengalami enam kali pergantian direktur selama tiga tahun keberadaannya merupakan contoh lain. Pada awal pelaksanaan program masalah kontroversi dalam penutupan 16 bank, maju mundurnya pelaksanaan kebijakan penundaan proyek-proyek, penghilangan monopoli, semua menunjukkan lemahnya konsistensi. Sampai akhir-akhir ini pelaksanaan privatisasi, devestasi dan penjualan aset bank dan perusahaan bermasalah, semuanya menunjukkan kurangnya konsistensi pelaksanaan program. Demikian

KKN, dan beberapa hal lain. Sebagai dampak yang nyata, krisis berkepanjangan dan pemulihan tak kunjung terlaksana.¹⁰

Penerapan reformasi yang dianjurkan IMF ini tidak berjalan lancar dan kelanjutan pembicaraan mantan Presiden Suharto dengan mantan Direktur IMF Michael Camdessus, adalah penandatanganan *Letter of Intent* (LoI) pada tanggal 15 Januari 1998. Dalam kesepakatan ini Indonesia secara tegas disarankan untuk menjalankan program reformasi yang telah ditetapkan oleh LoI terdahulu. Menurut IMF, Indonesia dapat pulih dari krisis apabila Indonesia mengikuti saran yang dianjurkan IMF. Reformasi yang ditawarkan IMF meliputi lima kebijakan, yaitu : (1) Kebijakan fiskal, (2) Kebijakan moneter, (3) Reformasi struktural, (4) Reformasi Perbankan, (5) dan Restrukturisasi Hutang Swasta.

C. Perumusan Masalah

Dengan ditandatanganinya *Letter of Intent*, maka suatu negara penerima bantuan bersedia untuk melakukan perubahan-perubahan kebijakan ekonomi sesuai yang disarankan oleh IMF. Namun kenyataan yang terjadi di Indonesia setelah mendapat bantuan IMF, tidak juga mengalami kemajuan ekonomi yang seperti diharapkan. Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka pokok permasalahan yang bisa dikemukakan di sini adalah :

Faktor-faktor apakah yang menghambat IMF dalam proses pemulihan ekonomi Indonesia ?”

D. Kerangka Dasar Teori

Teori merupakan penjelasan yang paling umum, yang memberitahukan kepada kita mengapa sesuatu terjadi dan kapan sesuatu akan terjadi. Dengan demikian selain dipakai untuk eksplanasi. Teori juga merupakan dasar dari sebuah prediksi dari pengertian ini, singkatnya teori dapat juga dikatakan sesuatu yang terjadi atau yang akan terjadi.¹¹

Sedangkan konsep adalah : Suatu konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu objek atau fenomena tertentu.¹², konsep dapat juga diartikan sebagai istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak, yakni kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial.¹³

Untuk menjawab pokok permasalahan di atas, maka penulis akan mencoba menjawabnya dengan menggunakan Konsep Ekonomi Politik Internasional, Konsep Organisasi Internasional dan Konsep Pemulihan Ekonomi.

Konsep Ekonomi Politik Internasional

Pertanyaan yang dirumuskan dalam permasalahan di atas merupakan pembahasan yang berdimensi ekonomi politik. Dimana kondisi politik dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian konsep ekonomi politik dapat dimaknai sebagai berikut:

“Hal-hal yang mengatur bagaimana proses-proses sosial dan institusional dimana kelompok elit ekonomi dan politik berusaha mempengaruhi keputusan-keputusan untuk mengalokasikan sumber-sumber produktif langka untuk masa sekarang atau mendatang baik untuk kepentingan kelompok elit ekonomi dan politik maupun untuk kepentingan masyarakat luas. Hal ini berarti mencerminkan

¹¹ Mochtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional*, LP3ES, Jakarta, 1993, hal 217.

¹² Ibid.

keterikatan yang erat antara ekonomi dan politik dengan tekanan pada peran khusus dan pengambilan keputusan ekonomi.¹⁴

Kondisi perekonomian suatu negara yang tidak sehat tentu saja dapat mempengaruhi ekonomi politik regional bahkan dunia. Maka itu dibutuhkan suatu interaksi antara negara bahkan lembaga internasional untuk mengatasi pemulihan perekonomian yang tidak sehat itu.

Menurut Gus Subagyo dalam *restrukturisasi dan birokrasi* bahwa: keberhasilan program pemulihan ekonomi Indonesia ditentukan oleh konsistensi terhadap paket reformasi ekonomi yang disepakati. Dengan kondisi politik keamanan yang tidak stabil akan menghambat proses pemulihan ekonomi. Kalaupun ada kegagalan dalam membantu negara yang sedang terkena krisis, hal itu tidak sepenuhnya kesalahan IMF melainkan karena kondisi domestik dari suatu negara tersebut.¹⁵

Konsep Organisasi Internasional

Organisasi Internasional telah menjadi salah satu aktor penting dalam hubungan internasional. Forum Organisasi Internasional merupakan peyelarasan dari beberapa kepentingan aktor-aktor yang bermain didalamnya. Menurut Jack C. Plano yang dimaksud Organisasi Internasional adalah merupakan suatu ikatan formal melampaui batas wilayah nasional yang menetapkan untuk membentuk mesin kelembagaan agar memudahkan kerja sama diantara mereka dalam bidang keamanan, ekonomi, sosial serta bidang lainnya.¹⁶

¹⁴ Michael. P. Todaro, dalam Arif Budiman, *Teori Pemhangunan Dunia Ketiga*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 1996, hal. 17.

¹⁵ Gus Subagyo, *Restrukturisasi dan Birokrasi*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2003, hal. 43.

¹⁶ Jack C. Plano, *The Role of the International Organization for Development*, Jakarta, 1986.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa organisasi masyarakat sangat berperan bagi pembangunan di setiap negara. Bahkan dapat dikatakan organisasi masyarakat yang telah melampaui batas negara amat berperan penting sebagai alat atau proses tercapainya tujuan kepentingan nasional di setiap negara. Yang dimaksud alat disini bahwa Organisasi Internasional mempunyai kekuatan yang sangat mendukung bagi kepentingan berbagai negara untuk menyalurkan kepentingan mereka yang melewati batas-batas wilayah nasional. Dengan alat Organisasi Internasional, negara-negara dapat berfungsi lebih baik di mata masyarakat internasional maupun di mata masyarakat negara itu sendiri.

Dengan tujuan sebagai lembaga untuk mempromosikan kerjasama moneter internasional melalui lembaga permanen yang menyediakan mekanisme untuk konsultasi dan kolaborasi tentang masalah moneter internasional, tentu saja IMF memiliki peran yang besar kepada negara-negara anggotanya. Kondisi politik suatu negara juga mempunyai timbal balik pengaruh kepada masalah ekonomi yang dilakukan oleh IMF guna mencapai tujuan penyehatan ekonomi. Semakin terpuruknya situasi dan kondisi politik Indonesia pada pertengahan tahun 1998, menambah hambatan bagi proses pemulihan ekonomi yang dijalankan oleh IMF lembaga untuk mempromosikan kesehatan ekonomi melalui kerjasama moneter internasional.

Organisasi Internasional berfungsi sebagai media untuk berkomunikasi secara internasional yang berbeda-beda dengan demikian adanya peranan

tertentu di dalam lingkup lingkungan internasional. Dapat dikatakan peran Organisasi Internasional merupakan reaksi dari situasi internasional yang muncul.

Pengaruh dan berdirinya Organisasi Internasional dalam kehidupan suatu negara baik pada saat krisis maupun saat membangun adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa, karena Organisasi Internasional bertujuan untuk mengembangkan politik dan keamanan nasional di satu pihak serta pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial di pihak lain.

Mengacu pada klasifikasi yang dibuat oleh Coulombis dan Wolfe bahwa organisasi antar pemerintah (*IGO*) dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori besar yang berdasarkan pada keanggotaan dan maksud/ tujuan. *Pertama*, Organisasi Internasional antar pemerintah dengan maksud dan tujuan yang umum. Seperti Liga Bangsa-Bangsa dan PBB. Kedua Organisasi Internasional ini ruang lingkungannya global dan menjalankan pelbagai macam fungsi, seperti dalam bidang kerja sama ekonomi, keamanan, perlindungan atas hak asasi manusia, pengembangan kebudayaan, kesehatan dan sebagainya. *Kedua*, Organisasi Internasional antar pemerintah dengan keanggotaan global dan tujuan yang spesifik atau khusus. Organisasi jenis ini dikenal pula dengan organisasi yang fungsional sebab menjalankan fungsi yang bersifat khusus. *Ketiga*, organisasi antar pemerintah dengan keanggotaan regional atau kawasan dan dengan maksud dan tujuan umum. Organisasi seperti ini merupakan organisasi internasional yang meliputi kawasan tertentu, fungsi dan tanggung jawab keamanan, politik dan sosial ekonominya berskala luas. *Keempat*, organisasi antar pemerintah dengan

Organisasi Internasional semacam ini bergerak dalam satu bidang khusus yang anggotanya meliputi suatu kawasan tertentu.¹⁷

Berdasarkan klasifikasi yang tertulis di atas, International Monetary Fund (IMF) merupakan Organisasi Internasional fungsional, sebab dalam menjalankan fungsi dan peranannya bersifat khusus pada masalah perekonomian suatu bangsa.

Konsep Pemulihan Ekonomi

Pertanyaan yang dirumuskan dalam permasalahan di atas merupakan pembahasan yang berdimensi ekonomi. Pembahasan senantiasa mengarah pada interaksi kata-kata ekonomi dalam memanfaatkan sarana-sarana produktif.

Pemulihan ekonomi Indonesia merupakan proses menuju ke struktur perekonomian yang sehat dan normal kembali, sehingga perekonomian dapat kembali stabil. Oleh karena itu diperlukan upaya pemulihan ekonomi melalui program-program amat penting untuk diupayakan.¹⁸

Lambatnya pemulihan ekonomi Indonesia, diduga adanya perbedaan visi kebijakan IMF sangat tidak mungkin tidak sejalan dengan apa sudah dan akan dijalankan oleh pemerintah. Boleh jadi persyaratan yang diajukan IMF sebelumnya tidak cocok dengan yang diinginkan pemerintah Indonesia. Paket-paket kebijakan pemulihan yang diisyaratkan IMF tersebut dinegosiasikan yang dilakukan akhirnya mencapai suatu langkah kompromi yang tercermin dari paket bantuan dana dan kebijakan yang harus ditempuh Indonesia.¹⁹

¹⁷ Theodore A Coulumbis dan James H. Wolfe, *Pengantar Hubungan Internasional : Keadilan dan Power*, ed ke-3, terjemahan oleh Mercedes Marbun, Putra A Bardin, Jakarta, 1999; hal. 281.

¹⁸ Didik J Rachbini, *Analisis Krisis Politik Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hal x.

¹⁹ Edy Suandi Hamid, *Perekonomian Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hal 148.

E. Hipotesa

Berdasarkan pada permasalahan dan kerangka konseptual yang telah ditetapkan, maka penelitian ini dimulai dari hipotesa bahwa faktor-faktor yang menjadi hambatan IMF dalam memulihkan perekonomian Indonesia adalah tidak konsistensinya pemerintah terhadap kesepakatan yang dibuat dan juga faktor-faktor stabilitas politik dan keamanan.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjawab perumusan masalah yang ada dengan fakta dan data.
2. Untuk membuktikan hipotesa yang sudah diambil dengan teori-teori yang relevan.

G. Jangkauan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis memberikan batasan waktu dengan maksud untuk mempermudah analisa yang akan dilakukan sehingga penulisan ini menjadi jelas. Adapun batasan waktu yang dipilih adalah tahun 1998 sampai jangka waktu pada tahun 2003, tanpa mengabaikan kejadian-kejadian di waktu lain yang relevan dan juga data-data yang menunjang penulisan ini.

H. Metode Pengumpulan Data

Keberadaan metode merupakan salah satu syarat diakuinya sesuatu menjadi

pandang terhadap objek metode serta hasil-hasil pandangnya merupakan suatu kesatuan yang utuh dan bulat atau sistematis.²⁰

Metode pengumpulan data dalam menyusun skripsi ini akan dilakukan dengan cara studi pustaka untuk mendapatkan data-data sekunder melalui buku-buku perpustakaan, jurnal-jurnal, majalah-majalah maupun surat kabar dan situs-situs terkait. Tidak menutup kemungkinan data juga diperoleh melalui media elektronik yang akan diusahakan kevalidannya dengan fakta-fakta yang mendukung.

I. Sistematika Penulisan

Bab I Merupakan Pendahuluan, berisikan tentang Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penelitian, Latar Belakang Masalah, Kerangka Dasar Teori, Hipotesa, Metode Pengumpulan Data, Jangkauan Penelitian, Metodologi Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II Pada bab ini penulis menulis tentang Tinjauan Umum International Monetary Fund (IMF).

Dalam sub-bab akan dibahas mengenai keberadaan IMF sebagai lembaga internasional di bidang penyehatan ekonomi dunia dari suatu negara, kebijakan-kebijakan IMF mengenai kebijakan moneter dan pengaruhnya terhadap negara berkembang seperti Indonesia.

Bab III Merupakan bab yang akan membahas mengenai ekonomi Indonesia, kondisi sebelum krisis dan sesudah krisis moneter.

Serta akan dibahas juga mengenai kebijakan IMF yang disetujui oleh Indonesia dan realisasinya.

Bab IV Dalam bab ini akan dibahas tentang ketidaksesuian teori dan pelaksanaan. Pada sub babnya akan program IMF dan kebijakan, aplikasi program IMF di Indonesia, tidak konsistensinya pemerintah Indonesia, dan faktor ketidakpastian kondisi politik dan keamanan yang menjadi salah satu penghambat pemulihan ekonomi.